

**Implikasi Hukum Dalam Struktur UU No 3 tahun 2025 Terhadap  
Dwifungsi TNI di Indonesia Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Sayyidin Arsyad Nurrabani**

**NIM. 05040421109**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Tata Negara**

**Program Studi Perbandingan Madzhab**

**Surabaya**

**2025**

## PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASILIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidin Arsyad Nurrabani  
NIM : 05040421109  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Implikasi Hukum Dalam UU No 3 Tahun 2025 Terhadap  
Struktur Pemerintahan di Indonesia Perspektif Fiqh  
Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 November 2025



**Sayyidin Arsyad Nurrabani**  
NIM. 05040421109

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sayyidin Arsyad Nurrabani

NIM : 05040421109

Judul : Implikasi Hukum Dalam UU No 3 Tahun 2025 Terhadap Struktur Pemerintahan di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 November 2025

Pembimbing,



Achmad Safiudin R., M.H..

NIP. 199212292019031005

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sayyidin Arsyad Nurrabani

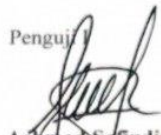
NIM. : 05040421109

Judul : Implikasi Hukum dalam Struktur UU No 3 Tahun 2025 Terhadap  
Dwifungsi TNI Perspektif *Fiqh siyāsah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at,  
tanggal 12 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata  
Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

#### Majelis Munaqasah Skripsi

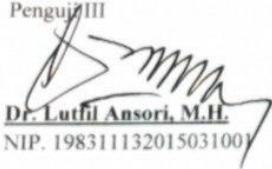
Penguji I

  
Achmad Saffudin R., M.H  
NIP. 1989212292019031005

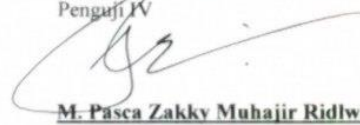
Penguji II

  
Prof. Dr. Titik Triwulan Tufik,  
S.H., M.H.  
NIP. 196803292000032001

Penguji III

  
Dr. Lutfi Ansori, M.H.  
NIP. 198311132015031001

Penguji IV

  
M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,  
S.H., M.Kn.  
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 19 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,

  
Dr. Hj. Sa'adah Musalla'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sayyidin Arsyad Nurrahani  
NIM : 05040421109  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
E-mail address : arsyadnurrahani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Implikasi Hukum Dalam Struktur UU No 3 tahun 2025 Terhadap Dwifungsi TNI di Indonesia  
Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Rabu, 7 Januari 2026

Penulis

(Sayyidin Arsyad Nurrahani)

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Tentara Nasional Indonesia mengakibatkan perubahan penting dalam tata kelola peran dan fungsi TNI dalam kerangka ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan diskusi tentang implikasi hukum yang mungkin timbul, terutama terkait potensi penguatan kembali konsep dwifungsi TNI, khususnya berkenaan dengan keterlibatan TNI dalam sektor sipil dan non-pertahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum dari struktur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap dwifungsi TNI di Indonesia dengan sudut pandang *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, yang menekankan asas ketatanegaraan Islam, pengendalian kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dan masyarakat sesuai konstitusi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk meneliti struktur, substansi, dan sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 serta relevansinya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk menelaah konsep dwifungsi TNI, supremasi sipil, dan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* seperti pembatasan kewenangan, amanah kekuasaan, keadilan, dan kepentingan umum.

Data dianalisis dengan metode deskriptif, yang menjelaskan secara sistematis norma hukum yang relevan dan konsep-konsep ketatanegaraan Islam, lalu menganalisis efek hukum terhadap praktik demokrasi dan tata kelola negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dapat membuka kemungkinan bagi TNI untuk berperan ganda di luar fungsi pertahanan, yang bisa menimbulkan konflik dengan prinsip supremasi sipil serta demokrasi konstitusional. Dalam kerangka *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, situasi ini dapat bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan pemisahan fungsi lembaga negara jika tidak diatur dengan jelas dan terarah.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan dalam norma hukum seputar batasan peran TNI di area sipil dan peningkatan mekanisme pengawasan dari segi konstitusi dan legislatif. Selain itu, prinsip *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* sebaiknya dijadikan dasar etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan agar fungsi TNI dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan kepentingan umum.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SKRIPSI .....                                                                                                               | i    |
| SKRIPSI .....                                                                                                               | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                                                | iii  |
| PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI.....                                                                                           | iv   |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....                                                                                                | v    |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI.....                                                                                                  | vi   |
| ABSTRAK.....                                                                                                                | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                         | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                             | x    |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                                                                                                  | xii  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                                                                                     | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                     | 1    |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                                                                                   | 10   |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                                    | 11   |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                                                  | 11   |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                                 | 11   |
| F. Penelitian Terdahulu.....                                                                                                | 12   |
| G. Landasan Teori.....                                                                                                      | 18   |
| H. Definisi Operasional.....                                                                                                | 29   |
| I. Metode Penelitian .....                                                                                                  | 31   |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                                                    | 31   |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                              | 32   |
| 3. Sumber Hukum .....                                                                                                       | 32   |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                     | 33   |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....                                                                                        | 33   |
| J. Sistematika Pembahasan.....                                                                                              | 34   |
| BAB II Hubungan Sipil dan Militer Konsep Dwifungsi TNI Dalam Konteks Negara Hukum dan <i>Fiqh Siyāṣah Dustūriyyah</i> ..... | 36   |

|                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pemisahan kekuasaan .....                                                                                                                               | 36  |
| B. Teori Hubungan Sipil Militer (Huntington) .....                                                                                                         | 39  |
| C. Teori Negara Hukum.....                                                                                                                                 | 41  |
| D. Teori Fungsi Militer Modern.....                                                                                                                        | 43  |
| E. Teori <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....                                                                                                             | 46  |
| BAB III IMPLIKASI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2025 TERHADAP<br>STUKTUR DAN KEWENANGAN TNI DI INDONESIA.....                                       | 76  |
| A. Struktur Peraturan Nomor 3 Tahun 2025 Mengenai Amandemen Terhadap<br>Peraturan Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia<br>76 |     |
| B. Perbedaan Antara Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI dengan<br>Peraturan No 3 Tahun 2025 Mengenai Revisi Peraturan No 34 Tahun 2004.....         | 84  |
| C. Konsep Dwifungsi Dalam Peraturan No 3 Tahun 2025 Mengenai Revisi Peraturan<br>No 34 Tahun 2004.....                                                     | 86  |
| D. Analisis Struktur Norma UU No 3 Tahun 2025 .....                                                                                                        | 92  |
| E. Pertentangan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Undang-Undang No 3 Tahun<br>2025 Tentang TNI.....                                                          | 95  |
| F. Potensi Fungsi Dwifungsi TNI Dampak Terhadap Demokrasi <i>Rule Of Law</i> .....                                                                         | 97  |
| BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP UNDANG – UNDANG NO 3 TAHUN 2025<br>KONTEKS DWIFUNGSI TNI.....                                                 | 95  |
| A. Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> .....                                                                                                                    | 95  |
| B. Implikasi Dwifungsi Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i> .....                                                                                                | 102 |
| C. Rekomendasi Pasal 47 Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> .....                                                                                   | 103 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                        | 112 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                        | 112 |
| B. Saran .....                                                                                                                                             | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                       | 115 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                                             | 125 |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                                                                      | 133 |

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bactiar. Hukum Metode Penelitian. Banten: UNPAM Press, 2018
- Bilveer Singh. Karya buku yg berjudul "Dwifungsi Abri: Asal-usul, Aktualisasi, dan Implikasinya untuk Stabilitas dan Pembangunan" diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1996
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Djuyandi, Yusa. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. UMMPress: Malang 2025
- H.A. Djazuli. *Fīqh Siyāsah* Penerapan Kemaslahatan Umat dalam Pedoman Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hakim, Abdul Aziz . Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia (Malang: Alumni, 2009),
- J.Suyuti. "*Fīqh Siyāsah*: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran", Yogyakarta : Ombak, 2014.
- Kusnardi, Moh. . Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Sinar Bakti, 1987)
- Muhammad Iqbal. Penafsiran Doktrin Politik Islam. di Jakarta: Kencana, 2014
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Susdarwono, E. T., M. Si SH, and S. H. Alma Wiranta. *Pemikiran Di Sekitar Revisi Undang-Undang TNI*. Goresan Pena, 2025.

Yahya A. Muhaimin karya bukunya yg berjudul Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, 1945-1966, diterbitkan di Yogyakarta oleh Gadjah Mada University Press pada tahun 1982

### **Skripsi, Jurnal, Makalah dan Artikel**

Abdillah, M. Konstitusi dalam Persepektif *Fiqh Siyāsah*: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah. Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol, 4(2), 2024

Anggriani, Widia. “*Selection of Village Community Institutions Siyasah Dusturiyah Perspective.*” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, 2021.

Anwar Daud menulis jurnal berjudul "Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata: Melacak Sejarah Keterlibatan Angkatan Bersenjata dalam Kehidupan Sosial dan Politik di Indonesia", yang diterbitkan di jurnal adabiya aceh pada tahun 2018

Arfalin Adinia. “Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI di Intansi Kementerian Prespektif *Fiqh Siyāsah Idāriyah*”. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024

Arizki, I. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi). Disertasi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025

Asrudin Azwar and Mirza Jaka Suryana. "Peran Ganda TNI Dari Waktu ke Waktu". Jurnal Academia Praja, 2021

Asshiddiqe Jimly. Sangketa Kewenangan Antarinstansi Negara, Jakarta, 2006

Bahaya Perang di Jawa Timur Tahun 1946-1962." Jurnal Pendidikan Sejarah. 2017, 1363-1374. DOI : <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/17592>

Chalim, Munsharif Abdul, and Faisal Farhan. "Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia." Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015

Chasanuddin, A., & Nafisah, Z., Konsep *al-Maslahah al-Ammah*. Dalam Perspektif Fiqh Sosial Kh. Ma. Sahal Mahfudh. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(2), Pati, 2019

Dini, Aliefya, and Khalid Khalid. "Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif *Siyāsah Dustūrīyah Qadā'īyyah*." Jurnal Hukum *Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappangara (editor). *Militer di Indonesia*. Disertasi Penerbit artikel Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000

Efendi Saputra. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Rangkap Jabatan TNI Dan Polri Sebagai Komisaris Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN" Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021

Encik Mochammad Musthofa Alamsyah. Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah". Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023

Fina Aprillia Rosadi. “Peran Partai Politik dibawah Ambang Batas Parlemen pada Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2024 menurut Perspektif *Fiqh SIYĀSAH SYAR’IYYAH*”. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024

*Frontiers in Sociology* 6, no. 5 (2024)

*Guarantees Individual Rights and Freedoms.” International Journal of*

Gunawan, H. Sistem peradilan islam. Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 5(1), Disertasi IAIN Padangsidempuan, 2019

Hadi, T. Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajlurrahman Jurdi Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*. Disertasi UIN Raden Intan Lampung, 2018

Harold Crouch dalam analisis yang berjudul *The Army and Politics in Indonesia*, Ia mencatat bahwa militer Indonesia, sejak awal keberadaannya, tidak pernah melihat diri mereka sebagai alat negara yang perhatian terhadap isu keamanan.

Hendrik Kurniawan. “Analisis *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Mekanisme Pengangkatan Anggota TNI/Polri Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota”. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

Hesti Nurani, “Disharmonisasi Norma Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tentara Nasional Indonesia Aktif Pada Masa Transisi Pilkada Serentak 2024”. Disertasi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023

Ikhsan Yosarie. Militer Dan Politik Di Indonesia. Disertasi Universitas Andalas Padang, 2017

Kuswan Hadji. “Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024)

M. Zidni Maulana. “Penegakkan Disiplin Prajurit dalam Pembaharuan Hukum Disiplin Militer”. Disertasi UPN Veteran Jakarta, 2015.

Muh. Fajar Sadiq. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Status Aktif Sebagai Penjabat Bupati”. Disertasi Universitas Hasanuddin Makassar, 2023

Muhammad Adlan Kamil. “Legalitas Anggota TNI Aktif dalam Rangkap Jabatan Sipil”. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Muhammad Alvin Saputra. “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran TNI-AD dalam Melakukan Penertiban Protokol Kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021”. Disertasi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nabilla Harya Tata Segara, “Penempatan Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara”. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2025

Nugroho Notosusanto. tulis artikel "Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia, dalam seri Prisma, Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia: Pilihan Artikel Prisma, Jakarta: LP3S, 1995, halaman 4. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Vietnam pada tanggal 2 September 1945, Aljazair pada tanggal 3 Juli 1962, dan Israel pada tanggal 14 Mei 1948, yang diakui pada tanggal 1 Mei 1949.

Nurhalisa, N. . Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyāsah Dustūrīyah*. Disertasi IAIN Parepare, 2025

Prayuda, M. K. Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Pasangan Nikah Siri dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan

Hukum: Expanding the Utilization of the Absolute Statement of Responsibility (SPTJM) for Couples in Unregistered Marriages to Achieve Legal Certainty and Justice. BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(2). Disertasi STIBA Makassar, 2025

Puspitasari, Treissa, Lutfi Fahrul Rizal, and Taufiq Alamsyah. "Tinjauan *Siyāsah Dustūrīyah Tanfīzīyah* Terhadap Hak Pilih Mahasiswa Non Domisili Pada Pemilu Serentak 2024 Di Kota Bandung." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025)

Rahmansyah, D. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Perspektif *Siyāsah Dustūrīyah*. Disertasi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024

Rahmawati, Indri. "Netralitas TNI Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Militer." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3.3 (2024): 106-117.

Razi, F. Analisis Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tni Terhadap Potensi Pelemahan Supremasi Hak-Hak Sipil Dan Ancaman Bagi Demokrasi Indonesia. *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2025

Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021):

Ritwan Junianto. "Penerapan Undang-Undang Status Keadaan Darurat dan

Segara, N. H. T. Penempatan Prajurit TNI Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Jabatan Aparatur Sipil Negara Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025

Suryajiyoso, Suryajiyoso. “Power and Authority in the State Administration System:  
 Comparing the Netherlands and Indonesia.” *Journal of Law and Legal Reform* 2,  
 no. 3 (2021)

Syamsuar, and Darlin Rizki. “Transformation of the Political Bureaucracy System in  
 Indonesia : *Siyāsah Dustūrīyah Approach From The.*” *Proceeding of Dirundeng  
 International Conference on Islamic Studies (DICIS)* (2023)

Trihatmaja, Benderang Bintang. “Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa Pada  
 Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif  
*Siyāsah Dustūrīyah Tasyrī'īyah*” 7, no. 1 (2025)

### **Data Elektronik**

Kemhan.go.id, integrasi teknologi militer modern untuk strategi pertahanan indonesia,  
 kemhan.go.id, 2024 diakses pada  
<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2024/12/10/integrasi-teknologi-militer-modern-untuk-strategi-pertahanan-indonesia.html#:~:text=Peran%20Teknologi%20Modern%20dalam%20Pertahana n,seperti%20kapal%20perang%20dan%20infanteri>. Pada 14 Desember 2025

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (3) tentang  
 sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, 1945  
[https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

2002 <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2002/3TAHUN2002UU.htm>

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2004

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40503/uu-no-10-tahun-2004>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional,

2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/380719/UU%20Nomor%203%20Tahun%202025.pdf>

### **Al-Quran**

Surah Al-Baqarah Ayat 205

Surah An-Nisa Ayat 58

### **Hadist**

Hadist Shahih Riwayat Al-Bukhari No 6496 Tentang Amanah

UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA